

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BULELENG**

**Oleh
Putu Pipit Pricellia Eka Putri
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisis implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji serta menganalisis pertimbangan jaksa dalam hal melakukan tuntutan atas tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan penyajian dekriptif-preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu *non probability sampling* yang jenisnya *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa (1) Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak bisa diimplementasikan pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng meski dilakukan saat pandemi; (2) Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi ini mempertimbangkan tidak memberikan pidana mati karena atas dasar HAM dan terdakwa telah mengembalikan secara penuh kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pidana Mati.

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in cases of corruption in the Office of Tourism and Culture of Buleleng Regency; and (2) reviewing and analyzing the prosecutor's considerations in terms of carrying out prosecutions for the corruption crime of the Tourism and Culture Office of Buleleng Regency based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001. The type of research in this research is empirical juridical which is analyzed qualitatively by presenting descriptive-prescriptive. The data used in this research is primary data. Data collection techniques using interview and observation techniques. Meanwhile, the technique of determining the sample in this study namely non probability sampling which type purposive sampling. Based on the results of the research, it was found that (1) Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 could not be implemented in the case of corruption in PEN fund grants from the Tourism and Culture Office of Buleleng Regency, even though it was carried out during a pandemic; (2) In prosecuting this corruption case, the prosecutor considers not giving the death penalty because it is based on human rights and the defendant has fully returned the state's financial losses.

Keywords: *Crime, Corruption, Death Penalty.*